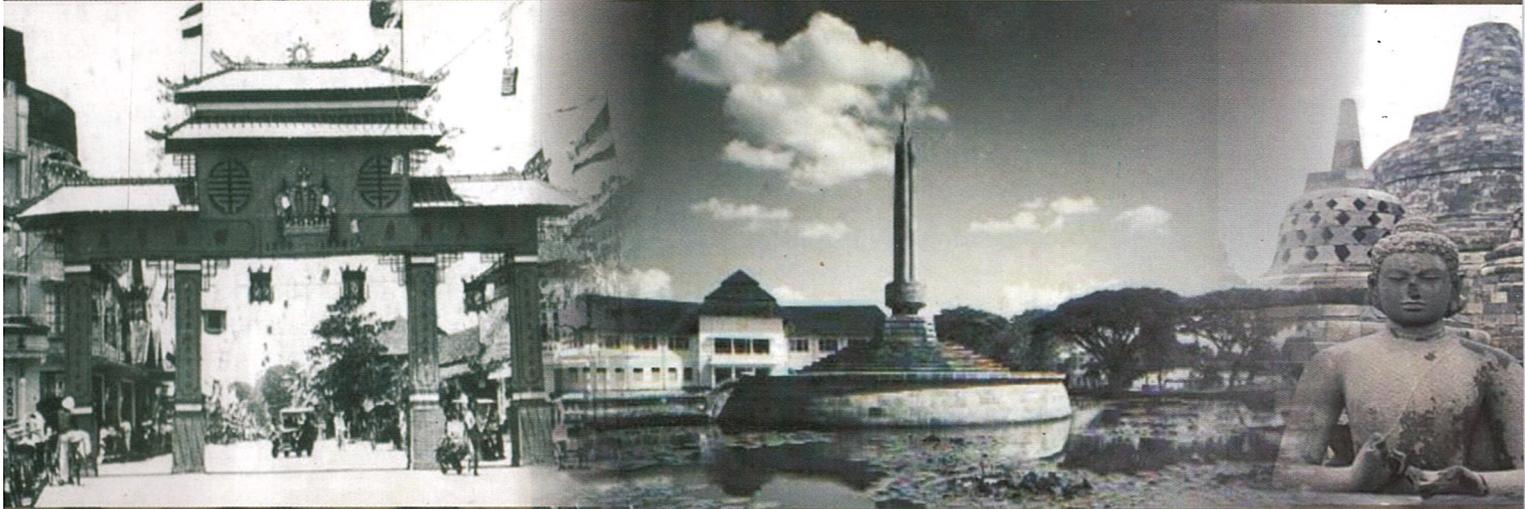
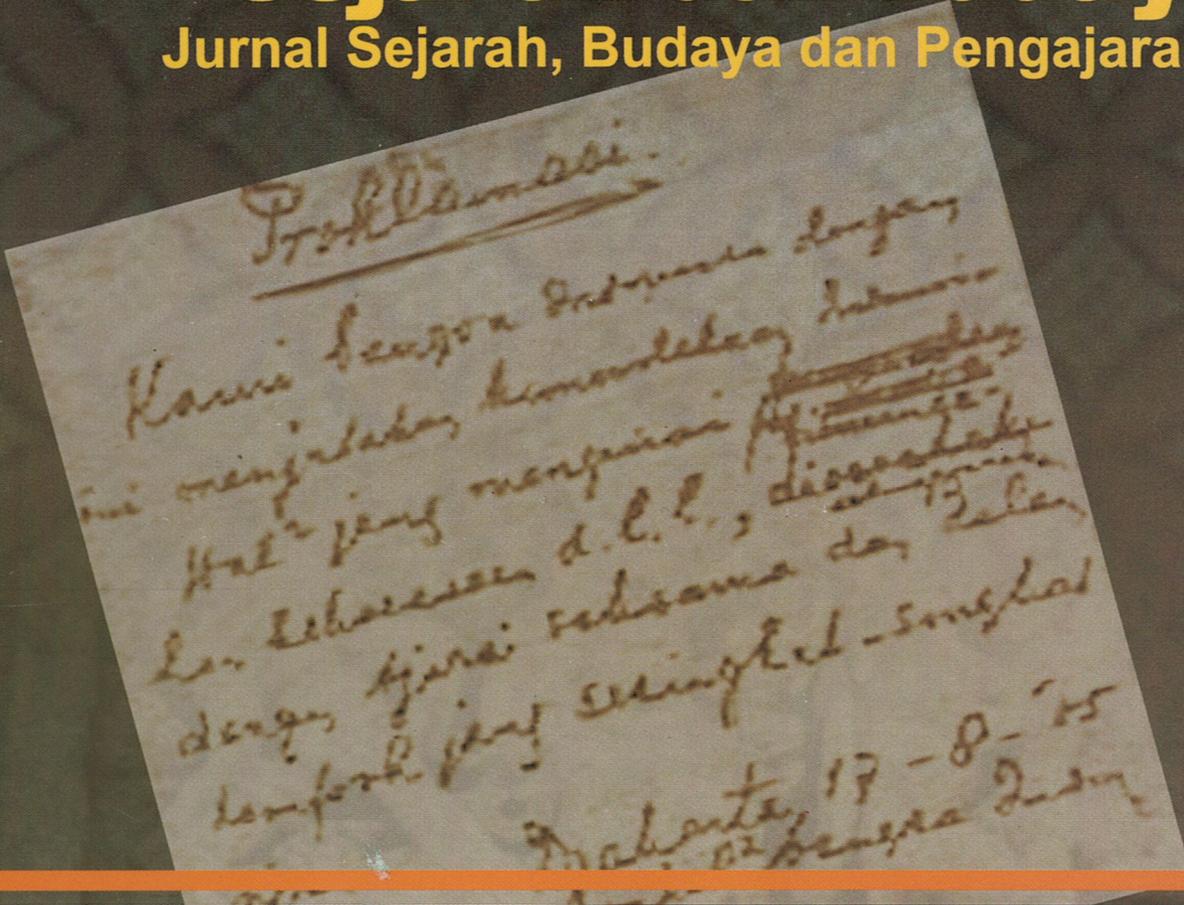


# Sejarah dan Budaya

Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya



# Sejarah dan Budaya

## Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember; ISSN 1979-9993 berisi tulisan Ilmiah tentang sejarah dan hubungannya dengan pengajaran, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun asing. Tulisan yang dimuat berupa analisis, kajian dan aplikasi; hasil penelitian, dan pembahasan kepustakaan.

### ***Ketua Penyunting***

Waskito

### ***Wakil Ketua Penyunting***

Dewa Agung Gede Agung

### ***Penyunting Pelaksana***

Nur Hadi

Slamet Sujud Purnawan Jati

Marsudi

M. Misbahul Amri

### ***Penyunting Ahli***

Siti Malikh Thowaf (UM)

Lilie Suratminto (UI)

Siti Fatimah (UNP)

Sutejo K. Widodo (UNDIP)

### ***Pelaksana Tata Usaha***

Candra Kurnia Putra

Jayanti Herawati

Alamat penyunting dan tata usaha: Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Jl. Surabaya No 6 Malang 65145 Gedung E7, Telepon 551-312 psw 230, Langganan 2 Nomor setahun Rp. 50.000,-. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha atau melalui Bank Mandiri Rekening No. 144-00-0664873-4 Kantor Cabang Pembantu Malang Suprpto.

---

Sejarah dan Budaya, Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Malang. Ketua Jurusan: Hariyono dan Sekretaris Jurusan : Marsudi.

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi rangkap pada kertas kwarto, panjang 10-20 halaman sebanyak 2 eksemplar (lebih lanjut silahkan baca petunjuk pada sampul dalam belakang). Naskah dalam bentuk *print out* dikirim ke alamat penyunting, sedangkan yang dalam bentuk *soft copy* dapat dikirim ke e-mail: [jurnalsejum@yahoo.co.id](mailto:jurnalsejum@yahoo.co.id) Naskah yang masuk dievaluasi oleh Penyunting Ahli dan/atau Peninjau Ahli. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

---

Jurnal ini diterbitkan di bawah pembinaan Tim Pengembang Jurnal Universitas Negeri Malang. Pembina: H. Suparno (Rektor). Penanggung Jawab: H. Kusmintarjo. Ketua: H. Ali Saukah. Anggota: Suhadi Ibnu, H. Amat Mukhadis, Mulyadi Guntur Waseso, Margono. Staf Teknis: Hj. Ida Siti Danilah, H. S. Fuad, Aminarti S. Wahyuni. Pembantu Teknis: Stefanus Sih Husada, Sukarto, Akhmad Munir, Sri Rahayu. Pembantu Administrasi: Imam Gozali, Nurul Indayanti.

# Sejarah dan Budaya

## Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya

Tahun Kedua, Nomor 2, Desember 2009

---

### Daftar Isi

Kritik dan Pandangan Analisis Terhadap Teori Rasionalisasi Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas. <i>Trikuntari Dianpratiwi</i> .....	1
Jerusalem : Kota Dalam Sengketa. <i>Ajat Sudrajat</i> .....	15
Gerakan Politik Pada Masa Penjajahan Jepang. <i>I Wayan Legawa</i> .....	31
Modernisasi Transportasi Di Kota Malang 1899-1930. <i>Reza Hudiyanto</i> .....	48
Religi Jawa dan <i>Remaking</i> Tradisi <i>Grebeg</i> Kraton, Sebuah Kajian Antropologi. <i>Nugroho Trisnu Brata</i> .....	59
Penetrasi Agama Negara Pada Komunitas Tengger Di Kantong Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru. <i>Nur Hadi</i> .....	69
Problematika Dan Tantangan Pesek (Pembelajaran Sejarah Emotif dan Kontroversional). <i>Aditya N. Widiadi</i> .....	81
Tradisi Bahtsul Masail Di Pondok Pesantren. <i>Joko Sayono dan A Munjin Nasih</i> .....	93

# TRADISI BAHTSUL MASAIL DI PONDOK PESANTREN

Joko Sayono dan A Munjin Nasih

Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Malang  
Jurusan Sastra Arab FS Universitas Negeri Malang

*Abstract:* Bahtsul masail is a scientific forum conducted by santri and Kyai to discuss vary of society problems, including religious, economical, political and social problems. The interesting phenomenon of this forum is the existence of yellow book (kitab kuning) as main reference in every decision making. The results of Bahstul matsail are heterogen and dynamics that means many problems can be given its way out based on their reason and reference book. The main basic of thinking in decision making is goodness for people without neglecting rules of religious standard. It is viewed as moral obligation of Kyai and Santri thorough Pesantren as religious tradisional institution to mantain society situation and condition in order to appropriate with religious norms.

**Key Words:** Tradition, Bahtsul Masail. Pondok Pesantren, Social Problems

Tidak dipungkiri bahwa dunia pesantren merupakan institusi Islam yang selalu menarik untuk diteliti, banyak hal telah dikaji dan diteliti oleh para peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun demikian, masih ada juga sisi-sisi lain yang belum tersentuh oleh mereka. Satu diantaranya adalah forum bahtsul masail, yakni suatu forum ilmiah yang dilakukan oleh para santri dan kyai guna membahas berbagai problematika yang terjadi di tengah masyarakat, baik problem keagamaan atau kemasyarakatan.

Di antara sisi menarik yang ada dalam forum ilmiah ini adalah keberadaan referensi klasik (baca: kitab kuning), sebagai rujukan utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum fiqih. Para santri selalu mengambil dasar argumentasinya melalui referensi-referensi klasik. Kalaupun harus merujuk

kepada referesi kontemporer, biasanya hal itu hanya bersifat pelengkap untuk memperkuat argumentasi (Nasih, 2005). Hal menarik lainnya adalah persoalan-persoalan yang dikaji para santri dalam bahtsul masail tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah-ibadah keseharian, seperti shalat, puasa, dan zakat, namun juga persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Bahkan dalam beberapa kesempatan keputusan-keputusan hukum fiqih yang terlahir dari bahtsul masail yang dilaksanakan terkadang “bersebarangan” dengan pemahaman umat Islam Indonesia pada umumnya. Contoh yang paling nyata dalam hal ini adalah diperbolehkannya perempuan menjadi seorang kepala negara, seperti di Indonesia. Juga pemberian status “mati syahid” bagi seorang muslim yang karena satu dan lain hal meninggal dunia pada saat menjaga tempat ibadah umat

non muslim, sebut saja gereja, vihara, atau pura.

Berdasarkan pengamatan awal penulis, pesantren-pesantren besar di Jawa Timur secara rutin melakukan bahtsul masail baik yang dilakukan dalam skup kecil di pesantren mereka atau gabungan antar pesantren se kabupaten, karesidenan dan propinsi Jawa Timur. Bahkan hasil dari bahtsul masail sebagian telah didokumentasikan dalam bentuk buku. Tema-tema yang dikaji di dalam buku-buku tersebut juga tidak terbatas pada persoalan thaharah, shalat, dan ibadah keseharian yang lain, namun juga persoalan kemasyarakatan, ekonomi dan politik.

Sebuah pertanyaan penting yang layak dikemukakan di sini adalah bagaimana komunitas pesantren (kyai dan para santri), tertarik untuk turut mendiskusikan persoalan-persoalan yang secara keilmuan berada "diluar" disiplin ilmu mereka? Selanjutnya bagaimana hasil kajian mereka bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah? Jawablah terhadap pertanyaan ini perlu ditelusuri melalui penelitian yang memfokuskan pada sistem pengambilan keputusan hukum (baca: hukum Islam) yang dilakukan oleh para kyai dan santri dalam bahtsul masail, dan latar belakang (alasan) para kyai dan santri mengangkat berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat untuk dikaji dalam forum bahtsul masail, Hal penting dan utama yang ingin diketahui jawabannya melalui penelitian ini adalah bagaimana tradisi bahtsul masail berlangsung di pondok pesantren. Masalah utama tersebut dapat diperinci menjadi masalah-masalah sebagai berikut; *pertama*, bagaimana

sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail yang dilakukan oleh peserta bahtsul masail. Masalah ini dijabarkan lebih rinci dalam tiga pertanyaan yakni: Bagaimana cara berfikir peserta bahtsul masail dalam memutuskan hukum? Bagaimana peserta bahtsul masail menggunakan pendekatan ilmu sosial dalam memutuskan hukum? Bagaimana keterlibatan pihak di luar pesantren dalam membantu memutuskan hukum? *Kedua*, Apa yang menjadi latarbelakang para peserta bahtsul masail mengangkat persoalan-persoalan politik dalam forum bahtsul masail? Masalah kedua selanjutnya dirinci sebagaimana berikut: Apa aspek-aspek politik yang menjadi fokus pembicaraan dalam forum bahtsul masail? Apa latar belakang penyebab peserta bahtsul masail memilih aspek-aspek politik tertentu yang dikaji dalam bahtsul masail? Apa dasar-dasar pemikiran (referensi) utama yang dipakai peserta bahtsul masail dalam mengambil kesimpulan dalam forum bahtsul masail

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tradisi bahtsul masail yang terjadi di pondok pesantren. Dan secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk: menjelaskan sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail yang dilakukan oleh peserta bahtsul masail, dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi para peserta bahtsul masail mengangkat persoalan-persoalan politik dalam forum bahtsul masail.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai patokan

dalam melakukan penelitian, kualitatif mengikuti kerangka pikir sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1998) serta Lincoln dan Guba (1985) menjadi acuannya. Parameter tersebut adalah *pertama*, bersifat alamiah. *Kedua*, menggunakan peneliti sebagai alat pengumpul data (*human instrument*). *Ketiga*, menggunakan analisis data secara induktif. *Keempat*, bersifat deskriptif. *Kelima*, batas penelitian ditentukan oleh fokusnya. *Keenam*, menggunakan teknik triangulasi untuk menentukan validitas hasil analisisnya. Penelitian ini dilakukan pada tiga situs, meliputi PP. Sidogiri Pasuruan (Kec. Rembang Kab. Pasuruan) dan PP. Al Falah Ploso Kediri (Kecamatan Ploso Kab. Kediri). Dengan perkataan lain, berdasarkan kasus dan situsnya, penelitian ini menerapkan desain studi kasus-multisitus.

Penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) pondok pesantren di Jawa Timur, yaitu Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pesantren Al Falah Ploso Kediri, sedangkan subyek penelitian adalah para kyai dan santri yang biasa terlibat dalam forum bahtsul masail. Dipilihnya kedua pondok pesantren tersebut, disamping keduanya termasuk pesantren terbesar di Jawa Timur, juga mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pesantren Sidogiri Pasuruan, mewakili wilayah Jawa Timur bagian timur yang sebagian penduduknya keturunan etnis Madura, sedangkan Pesantren Al Falah Ploso Kediri mewakili wilayah Jawa Timur bagian barat yang umumnya etnis Jawa.

Teknik penjarangan informasi yang digunakan adalah teknik bola salju (*snowball*). Dalam penelitian kualitatif teknik untuk memperoleh data di

lapangan dilakukan dengan tiga cara, yaitu: teknik wawancara terfokus, FGD, observasi dan dokumentasi. Hal ini diterapkan untuk mendapatkan data yang memadai dan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.

Analisis data selama pengumpulan data situs dilakukan dengan mengikuti proses yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1998) dan Huberman (1984), yaitu dimulai sejak atau bersamaan waktunya dengan proses pengumpulan data yang dilakukan secara bertingkat tiga atau empat kali tahapan pengumpulan data. Proses tersebut terdiri dari lima tahap analisis data yaitu: (1) penetapan fokus penelitian, (2) penyusunan temuan-temuan, (3) pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan dari pengumpulan data sebelumnya, (4) pengembangan pertanyaan analitik untuk mengumpulkan data berikutnya, (5) penetapan sasaran pengumpulan data berikutnya. Peneliti bergerak di antara Reduksi Data, display data, Analisis Data, dan temuan penelitian, dengan menggunakan model alir yang edikembang Miles dan Huberman.

## **Pesantren Sidogiri dan Pesantren Ploso**

### **1. Pesantren Sidogiri**

#### **a. Sejarah Pesantren Sidogiri**

Ada dua versi tentang tahun berdirinya Pondok Pesantren (Pesantren) Sidogiri. Dalam sebuah catatan yang ditulis oleh Pancawarga (Bani KH. Nawawie bin Nur Hasan) dan ditandatangani oleh *al-Maghfurlah* KH. Nurhasan Nawawie, KH. Cholil Nawawie dan KA. Sa'doellah Nawawie

tertanggal 29 Oktober 1963 disebutkan bahwa Pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1718. Dengan demikian, saat ini usia Pesantren Sidogiri adalah 287 tahun. Tapi, dalam catatan lain (1971) yang ditandatangani oleh *al-Maghfurlah* KA. Sa'doellah Nawawie tertulis bahwa tahun tersebut merupakan hari ulang tahun PPS yang ke 226. Itu berarti bahwa Pesantren Sidogiri (versi terakhir) berdiri pada tahun 1745, sehingga saat ini usia Pesantren Sidogiri menurut kalender Masehi adalah 264 tahun, atau 272 tahun dengan menggunakan hitungan kalender Hijriyah. Versi terakhir inilah yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman peringatan hari ulang tahun pesantren Sidogiri.

Pada 14 Shafar 1357 H bertepatan dengan 15 April 1938 M, KH. Abd. Djalil, pengasuh Pesantren Sidogiri saat itu, mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Miftahul Ulum (MMU). Setelah KH. Abd Djalil wafat pada 1947, Pesantren Sidogiri diasuh oleh KH. Kholil Nawawie. Pada saat itulah dibentuk suatu wadah permusyawaratan yang diberi nama Pancawarga yang aggotanya lima orang putera KH. Nawawie bin Noer Hasan, yaitu: KH. Noer Hasan (wafat 1967), KH. Kholil (wafat 1978), KH. Siradjul-Millah Waddin (wafat 1988), KA. Sa'doellah (wafat 1972), dan KH. Hasani (wafat 2001). Dalam pernyataan bersama, kelima putera KH. Nawawie merasa berkewajiban untuk melestarikan keberadaan Pesantren Sidogiri dan mempertahankan filosofi dan ideologinya.

Pasca kemangkatan sebagian besar anggota Pancawarga, yakni setelah wafatnya tiga dari lima anggota

Pancawarga, KH. Siradjul-Millah Waddin mempunyai gagasan untuk membentuk wadah baru. Maka dibentuklah organisasi pengganti yang diberi nama Majelis Keluarga yang beranggotakan cucu-cucu laki-laki dari KH. Nawawie bin Noer Hasan. Majelis Keluarga saat ini terdiri atas 6 (enam) cucu KH. Nawaie, yaitu: KH. Nawawi Abdul Djalil (Rois atau Pengasuh dan Anggota), Mas D. Nawawy Sa'doellah (Sekretaris), KH. Fuad Noer Hasan (Anggota), KH. Abdullah Syaukat Sirodj (Anggota), KH. Abdul Karim Thoyyib (Anggota), dan Mas H. Bahruddin Thoyyib (Anggota). Majelis Keluarga merupakan badan tertinggi di Pesantren Sidogiri yang bertugas membantu Pengasuh dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan Pesantren.

#### **b. Komponen Fisik dan Personal**

Pesantren Sidogiri memiliki sejumlah sarana fisik, yaitu: gedung pemondokan (asrama) santri yang berjumlah 13 unit dengan jumlah seluruhnya 276 kamar, masjid, 4 unit gedung madrasah (Gendung Al Ghazali, An An Nawawi, Ar Rofi'i, As Suyuthi) laboratorium bahasa, perpustakaan, serta kantor pusat pondok pesantren dan madrasah. Disamping itu terdapat sejumlah sarana penunjang, yaitu: Balai Pengobatan Santri (BPS), koperasi pesantren (KOPONTREN), balai tamu, kantin, dapur umum, serta kamar mandi dan wc untuk para santri.

Komponen personal Pesantren Sidogiri terdiri atas: (a) Majelis Keluarga, yang berjumlah 6 orang; (b) 8 orang Pengurus Harian; (c) 39 Pengurus Pleno; (d) Ustadz (guru) berjumlah 265 orang;

(e) staf tata usaha; dan (f) santri/murid berjumlah 5063 orang, yang dibedakan atas santri yang tinggal di Pondok Pesantren (PPS), dan santri yang berdomisili di luar Pondok Pesantren (LPPS).

### c. Struktur Organisasi Sistem Pendidikan

Dalam struktur organisasi Pesantren Sidogiri terdapat tiga unsur, yakni: Pengasuh yang dibantu Majelis Keluarga (sebagai pemegang kebijakan tertinggi), Pengurus (sebagai tenaga pelaksana), Santri atau Murid. Fungsi dan kedudukan masing-masing unsur adalah sebagai berikut. Pengasuh ialah pimpinan tertinggi yang memegang kebijakan dan wewenang penuh atas Pesantren Sidogiri. Majelis Keluarga ialah suatu badan yang anggotanya terdiri atas cucu-cucu laki-laki KH. Nawawie dan berfungsi sebagai tenaga pembantu tugas Pengasuh dalam mempertahankan dan mewujudkan cita-cita luhur Pesantren. Sedangkan Santri menurut definisi administrasi Pesantren Sidogiri ialah orang yang terdaftar sebagai santri dan bermukim di asrama Pesantren Sidogiri yang disebut dengan Daerah. Sedangkan Murid ialah orang yang terdaftar sebagai siswa yang belajar di Madrasah Miftahul Ulum (MMU), baik bermukim di asrama Pesantren Sidogiri ataupun berdomisili di luar Pesantren.

Pengurus Pesantren Sidogiri terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno. Pengurus Harian adalah mandataris Majelis Keluarga dalam menjalankan tugas-tugas majelis di Pesantren. Sedangkan Pengurus Pleno adalah badan pelaksana di lapangan.

Pengurus Harian berkewajiban melaporkan tugasnya kepada Majelis dalam forum rapat bulanan Majelis Keluarga yang diselenggarakan setiap Jum'at Kliwon. Sedangkan Pengurus Pleno melaporkan kinerjanya kepada Pengurus Harian setiap bulan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Secara umum, kegiatan pendidikan di Pesantren Sidogiri terbagi menjadi dua: pendidikan *madrasahiyah* (diniyah-klasikal), dan pendidikan *ma'hadiah* (luar madrasah-non klasikal). Pendidikan klasikal ini bernama Madrasah Miftahul Ulum (MMU). Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum klasik (*diniyah*) berupa kitab-kitab kuning yang biasa dipakai di berbagai pesantren pada umumnya, dan disajikan dengan metode yang relevan serta tidak meninggalkan makna ala Jawa untuk menentukan kedudukan *nahwiyah* dan *sharfiyah*-nya, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

MMU dibagi menjadi empat jenjang, yaitu: Sifir (satu tahun), Ibtidaiyah (enam tahun), Tsanawiyah (tiga tahun), dan Aliyah (tiga tahun). Kegiatan belajar mengajar jenjang Sifir dan Ibtidaiyah, dan Isti'dadiyah dilaksanakan pada pagi hari, sedangkan jenjang Tsanawiyah dan Aliyah dilaksanakan pada sore hari. Di samping itu, masih ada jenjang pendidikan persiapan yang diberi nama *Isti'dadiyah*. Jenjang ini menggunakan program khusus dan diselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun. Jenjang tersebut dilanjutkan pada jenjang Madrasah Aliyah Tarbiyatul Muallimin dan Kuliah Syariah. Kuliah Syariah memiliki

beberapa lembaga, yaitu: LPSI (Lembaga Penelitian dan Studi Islam), LMF (Lajnah Muraja'ah Fiqhiyah), *Barnamaj Takhashshush Fiqh* (Program Spesialisasi Ilmu Fikih), eFKa (Forum Kajian Ahadits), dan eFKit (Forum Kajian Tafsir). Salah satu program kerja LPSI (Lembaga Penelitian dan Studi Islam) adalah menerbitkan buletin mingguan *Istinbat*. Disamping program pendidikan *madrasahiyah* (klasikal), Pesantren Sidogiri juga menyelenggarakan sejumlah program pendidikan *ma'hadiyah* (nonklasikal) dengan sistem nonformal, seperti: pendidikan Al-Qur'an, pengajian kitab kuning, pendidikan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah (ANNAJAH), pelatihan tabligh /Jam'iyatul Mubalighin (JAMUB), pelatihan seni *hadrah*, pelatihan menulis baik dan seni kaligrafi Arab, dan kegiatan musyawarah (Bahtsul Masail).

## 2. Kondisi Pesantren Al Falah

### a. Sejarah Berdirinya Pesantren Al Falah

Berawal dari keinginan mengamalkan ilmu pengetahuan agama yang didapatkannya dari kota Makkah al-Mukarromah, KH. Ahmad Djazuli Usman merintis berdirinya sebuah pondok pesantren. Bersama dengan Muhammad Qomar, salah seorang santrinya, ia merintis berdirinya pesantren dengan cara yang sangat sederhana. Ia memulainya dengan sebuah pengajian yang dilaksanakan di masjid kenaiban (baca; KUA), yang ia rintis sejak masih berada di desa Karangates. Pengajian tersebut, dia mulai pertengahan 1924 dengan menggunakan sistem sorogan.

Masyarakat sekitar pondok pesantren Al-Falah Ploso pada awalnya tergolong masyarakat abangan (jauh dari agama). Ketika awal berdiri, banyak masyarakatnya mencemooh pondok pesantren Al-Falah. Apalagi para pejabat dan bandar judi, yang setatus quonya mulai terganggu. Mereka sering menyebarkan isu-isu sesat terhadap pondok pesantren ini. Fenomena semacam itu memang menjadi tantangan berat bagi pesantren yang menjadi pusat kegiatan simakan Al-Qur'an Mantab ini. Namun para pengurusnya tidak merasa gentar. Justru tantangan itu membulatkan tekad mereka untuk mengubah masyarakat abangan, menjadi masyarakat yang islami. Hasilnya seperti sekarang ini. Pesantren terus berkembang, dan kehidupan islami tercipta dengan sendiri di sekitar pondok pesantren.

### b. Komponen Fisik dan Komponen Personal

Pesantren Al Falah Ploso memiliki sejumlah sarana fisik, yaitu: gedung pemondokan (asrama) santri yang berjumlah 6 unit dengan jumlah seluruhnya 82. kamar, 1 masjid, 2 unit gedung madrasah, laboratorium bahasa, perpustakaan, serta kantor pusat pondok pesantren dan madrasah. Disamping itu terdapat sejumlah sarana penunjang, yaitu: klinik Pengobatan Santri, koperasi pesantren (KOPONTREN), balai tamu, kantin, dapur umum, serta kamar mandi dan wc untuk para santri. Komponen personal Pesantren Al Falah Ploso terdiri atas: (a) Majelis Pengasuh, yang berjumlah 5 orang Kyai. Untuk periode 2008-2009 dipimpin oleh KH. Nurul Huda Djazuli; (b) Dewan Mufattisy dan

Pertimbangan yang berjumlah 3 orang; (c) Dewan Pengurus Penasehat terdiri dari 6 orang; (d) Pengurus Harian, 9 orang; (e) Ustadz (guru) berjumlah 89.. orang; (e) staf tata usaha; dan (f) santri/murid berjumlah 2133 orang.

### c. Program Pendidikan

Program pendidikan dan pengajaran di ponpes Al-Falah, terdiri dari: Madrasah Ibtidaiyah (3 tahun), Madrasah Tsanawiyah (4 tahun), dan Majelis Musyawarah Riyadlotut Tholabah (5 tahun). Pada tingkat Ibtidaiyah materi yang banyak ditekankan adalah masalah akidah dan akhlak, sedangkan untuk tingkat Tsanawiyah ditekankan pada materi ilmu nahwu / sharaf dan ditambah ilmu fiqh, faroidl serta balaghah. Adapun Majelis Musyawarah merupakan kegiatan kajian kitab fiqh, yakni Fathul Qorib, selama satu tahun, Kitab Fathul Muin selama 1 tahun dan Fathul Wahab selama 3 tahun. Selain program tersebut masih ada kegiatan ekstra yang harus diikuti oleh semua santri, meliputi latihan berorganisasi, baca tahlil, muhafadhah, dibaiyah, kaligrafi dll. Juga ada kegiatan bahtsul masail. Program yang terakhir ini adalah sebagai wahana untuk melatih dan mencetak kader-kader syuriah dan Tim bahtsul bahsul masail. Untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar di pesantren yang mengasuh santri lebih dari 2000 ini hanya mengandalkan dari iuran santri atau SPP yang besarnya uang pangkal R. 600.000. ,- SPP Rp.300.000 ,- dan iuran lainnya Rp. 150.000,-

## B. Gambaran Pelaksanaan Bahtsul Masail

### 1. Komponen Bahtsul Masail

Pada setiap bahtsul masail yang dilakukan oleh para santri baik yang dilakukan di PP Sidogiri dan PP Al Falah Ploso tidak bisa dilepaskan dari dari 5 (lima) komponen utama. Masing-masing komponen bekerja sama dalam mensukseskan jalannya kegiatan bahtsul masail. Komponen-komponen tersebut adalah;

#### a. Moderator

Moderator adalah seseorang yang ditunjuk oleh panitia untuk memimpin jalannya bahtsul masail. Seorang moderator dalam bahtsul masail diharuskan orang yang benar-benar memiliki kecakapan berdiskusi sekaligus mempunyai ilmu yang cukup terhadap persoalan yang dibahas. Sebab moderator dalam BM tidak hanya berfungsi sebagai pengatur jalannya sidang BM, akan tetapi mereka juga harus bisa memahami ta'bir /dalil dalam Bahasa Arab yang dikemukakan oleh peserta.

#### b. Mushohhhiih

Mushohih adalah seseorang yang diposisikan sebagai pengarah. Posisi Mushohhhiih dalam BM sangat strategis, sebab mereka menjadi pihak yang mempunyai otoritas memutuskan hasil kajian dalam BM, apakah dapat diputuskan status hukumnya atau ditangguhkan. Karena strategisnya posisi mushohih, maka mereka yang menduduki posisi ini dipersyaratkan memiliki keilmuan yang mumpuni dan diatas rata-rata. Biasanya posisi ini diduduki oleh para kyai, para asatidz dan santri

senior, bergantung level BM yang diselenggarakan. Untuk sekup pesantren cukup asatidz atau santri senior, namun untuk BM yang lebih besar dan tinggi levelnya yang melibatkan pihak pesantren lain atau lembaga di luar pesantren, maka mushohihnya adalah para kyai. Dalam BM mushohih biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih.

c. Perumus

Perumus adalah seseorang yang bertugas merangkum berbagai jawaban dan argumentasi yang telah disampaikan dalam BM baik oleh peserta maupun mushohih. Perumus bertugas meredaksikan keputusan BM dalam redaksi yang sederhana sehingga dapat difahami oleh semua pihak. Perumus juga berkewajiban memilih argumentasi yang sangat relevan dari sekian ta'bir/dalil yang dikemukakan peserta, sehingga dengan demikian tidak semua ta'bir yang dipakai oleh peserta dipilih oleh perumus sebagai dalil yang layak dimuat. Perumus biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih.

d. Notulen

Notulen adalah seseorang yang bertugas menulis semua hasil BM dan ta'bir yang dipakai oleh para peserta dan mushohih. Untuk bahtsul masail yang melibatkan pihak luar pesantren posisi notulen biasanya diisi oleh para santri dari pesantren penyelenggara. Hasil catatan dari notulen selanjutnya diarsip untuk keperluan dokumentasi.

e. Peserta

Peserta adalah orang-orang yang terlibat dalam BM, yang terdiri dari para santri atau alumni. Sebelum

pelaksanaan BM para peserta telah disodori persoalan yang akan dibahas dalam BM beberapa hari sebelumnya. Karena itu, dalam pelaksanaan BM para peserta biasanya membawa sebanyak mungkin referensi untuk dijadikan sumber argumentasi. Bagi sebagian peserta, mereka tidak membawa referensi dalam bentuknya yang asli, akan tetapi mereka cukup membawa laptop yang berisi software yang berisi ribuan referensi.

## 2. Proses Kegiatan Bahtsul Masail

Bahtsul masail di pondok pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mengembangkan intelektualitas para santri. Kegiatan ini dilakukan di pesantren secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Ada pesantren yang menyelenggarakannya setiap minggu, setiap bulan, ada juga yang satu tahun dua kali. Semuanya bergantung kepada kondisi kesiapan pesantren dan agenda yang telah dirancang sebelumnya. Dua pesantren yang menjadi sasaran penelitian ini, yakni Pesantren Sidogiri Pasuruan dan Pesantren Al Falah Ploso, kegiatan bahtsul masail di kedua pesantren ini dapat dijumpai hampir tiap minggu. Beragam level bahtsul dapat ditemukan disana, mulai dari bahtsul masail yang diikuti oleh para santri pada level *ibtida'* (dasar) sampai level alumni dan para pengurus pesantren. Berikut ini gambaran proses kegiatan bahtsul masail yang kami temukan di lapangan. Mula-mula kegiatan bahtsul masail dibuka oleh seorang pimpinan bahtsul masail yang berposisi sekaligus sebagai moderator dengan mengucap salam dan mengajak

peserta membaca surat Al Fatihah bersama-sama. Selanjutnya moderator membacakan deskripsi masalah yang akan dibahas dalam bahtsul masail.

Perlu diketahui bahwa deskripsi masalah yang dimaksud dalam bahtsul masail adalah uraian mengenai persoalan yang akan dibahas yang meliputi; (1) uraian tentang gambaran suatu persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan (2) pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari persoalan tersebut yang berhubungan dengan status hukumnya dari kacamata fiqih. Adapun masalah-masalah yang dibahas biasanya berasal dari usulan para peserta yang diajukan beberapa hari sebelumnya kepada pihak panitia atau terkadang masalah tersebut sengaja dipilih oleh pihak panitia. Dalam rangka menunjang jalannya bahtsul masail, untuk kasus-kasus tertentu, panitia bahtsul masail sengaja mendatangkan pihak-pihak di luar pesantren sebagai nara sumber. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk membantu menjelaskan duduk perkara suatu masalah yang sedang dikaji. Nara sumber yang didatangkan adalah mereka yang diyakini mempunyai kompetensi di bidangnya. Misalnya, kalau persoalan yang dibahas seputar ekonomi, maka nara sumber yang didatangkan adalah ahli ekonomi atau pelaku ekonomi, demikian juga apabila persoalan itu seputar kesehatan yang didatangkan adalah dokter. Namun perlu dicatat disini bahwa tidak semua pondok pesantren berusaha mendatangkan nara sumber dari pihak luar. Biasanya hanya pesantren-pesantren besar yang mengundang nara sumber dalam bahtsul masail.

Bahtsul dibuka oleh moderator dengan membacakan deskripsi masalah, para peserta diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Dalam kasus ketika bahtsul masail dihadiri nara sumber dari luar pesantren, moderator biasanya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada nara sumber untuk mejelaskan suatu persoalan sesuai dengan latar belakang mereka, baru setelah itu moderator memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pendapatnya. Apabila para santri merasa belum dapat memahami secara baik apa yang diutarakan nara sumber, moderator kembali memberikan kesempatan kepada mereka untuk menanyakan hal-hal yang dirasa perlu kepada nara sumber. Jika penjelasan dari nara sumber seputar persoalan yang dikaji dirasa cukup, moderator langsung memberi kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Perang argumentasi pun mulai bisa dilihat pada sesi ini, beragam dalil yang diambilkan dari *ta'bir-ta'bir* (ungkapan/pendapat) yang dimuat dalam kitab kuning silih berganti bersautan terlontar dari mulut peserta. Suatu *ta'bir* disanggah dengan *ta'bir* yang lain begitu seterusnya sampai moderator merasa perlu mendudukkan atau meluruskan posisi *ta'bir* yang dipakai oleh peserta jika telah melenceng dari konteksnya. Dalam kondisi yang demikian keberadaan moderator dituntut tidak hanya cukup piawai dalam mengatur lalu lintas diskusi, akan tetapi lebih dari itu moderator harus mempunyai modal keilmuan yang cukup tentang bahasa Arab dan substansi masalah yang dikaji. Jika tidak demikian

moderator akan sulit mengendalikan jalannya bahtsul masail.

Fenomena saling menyanggah pendapat peserta lain dalam bahtsul masail ini bisa difahami mengingat bahwa para peserta datang ke dalam forum bahtsul masail tidak dengan fikiran kosong. Para peserta telah mempersiapkan beragam dalil (argumentasi) yang dipakai untuk memperkuat pendapat mereka dari literatur klasik (kitab-kitab kuning), khususnya literatur yang bersinggungan dengan fiqih. Kenyataan ini sangat mungkin mereka lakukan, karena biasanya deskripsi masalah yang dikaji dalam bahtsul masail terlebih dahulu telah diinformasikan kepada para peserta beberapa hari sebelumnya. Oleh karena itu, para peserta mempunyai waktu mengumpulkan bahan-bahan sebelum mengikuti bahtsul masail. Kegiatan saling menyanggah yang dilakukan peserta bahtsul masail tingkat frekuensi dan intensitasnya bergantung kepada tingkat kesulitan persoalan yang dikaji. Artinya semakin mudah persoalan yang dikaji, maka frekuensi sanggahan dari masing-masing peserta semakin kecil. Namun sebaliknya semakin sulit persoalan yang dikaji, maka frekuensinya semakin tinggi. Dan yang demikian tak jarang menimbulkan kesan yang kurang baik, bahwa bahtsul masail tak ubahnya ajang debat kusir antar peserta. Dalam setiap bahtsul masail, peserta harus membekali dengan ilmu logika dan retorika. Argumentasi yang tidak didukung dengan logika yang sistematis dan retorika yang mahir, akan mudah dikalahkan peserta yang lain dengan argumen yang lebih meyakinkan. Ajang

bahtsul antar santri sering menjadi lomba ketangkasan berfikir dan kecermatan menganalisis suatu masalah beserta teks rujukannya. Siapa yang menang disanjung dan siapa yang kalah dibantai, seperti layaknya perdebatan pada umumnya. Apabila perdebatan diantara peserta dianggap cukup, moderator memberikan kesempatan kepada *mushohhah* (pengarah) yang terdiri dari para kyai, ustad, atau santri senior untuk memberikan komentar atas pendapat para peserta. Dalam kenyataan di lapangan apa yang disampaikan oleh *mushohhah* tidak sepenuhnya bisa diterima oleh peserta, meskipun dari sisi kapabilitas mereka berada diatas "rata-rata" peserta. Apabila ada pihak peserta yang kurang sependapat dengan *mushohhah*, moderator mempersilahkan kepada mereka untuk mengutarakan argumentasi tandingan. Selanjutnya, moderator mempersilahkan kepada *mushohhah* memberikan penjelasan tambahan atas komentar para peserta. Namun demikian, sepanjang pengamatan kami, meskipun peserta telah mengutarakan argumentasinya, apa yang mereka sampaikan tidak banyak mempengaruhi pendapat *mushohhah*. Sebenarnya kalau pihak *mushohhah* benar-benar mampu memposisikan sebagai pengarah dan tidak selalu memaksakan pendapatnya, maka bahtsul masail di pesantren bisa menjadi ajang pendewasaan diri yang baik bagi para santri. Sebab perilaku saling menghargai dan tidak otoriter akan menjadi bekal berharga bagi para santri di dalam menyikapi berbagai problem keagamaan yang akan dihadapi kelak sekeluar dari pondok pesantren. Jika peserta merasa penjelasan *mushohhah*

bisa “diterima”, moderator meminta kepada *mushohhih* untuk memberi kesimpulan hukum dari persoalan yang dikaji dan selanjutnya mengakhiri pembahasan tersebut dengan membaca surah al Fatihah. Bacaan surat ini sekaligus sebagai penanda bahwa kajian atas suatu persoalan telah selesai. Dan apa yang disimpulkan oleh *mushohhih* secara otomatis menjadi keputusan bahtsul masail. Begitu seterusnya mekanisme seperti ini dipakai untuk mengkaji persoalan-persoalan yang lain yang telah diagendakan dalam bahtsul masail. Sekedar diketahui bahwa dalam suatu bahtsul bahtsul masail, persoalan yang dikaji biasanya lebih dari satu persoalan.

Proses bahtsul masail seperti tergambar di atas menunjukkan kepada kita adanya tradisi ilmiah yang ketat di dunia pesantren, terutama dalam hal pengambilan kutipan kitab atau yang biasa disebut dengan *ta'bir kitab*. Santri tidak cukup hanya menerangkan substansi teks, akan tetapi juga dituntut harus mahir dalam pengutipan secara harfiah, lengkap dengan bab, pasal, dan halamannya. Tidak berhenti sampai di sini, santri juga harus mampu membaca kutipan dan pemaknaannya dengan menyebutkan imam mana yang dianut dalam memaknai sebuah teks. Dalam pengamatan peneliti, tidak jarang ketika seseorang keliru dalam membaca *ta'bir* atau menaruh harakat dalam sebuah teks telah dianggap gugur seluruh argumennya. Praktek semacam ini terasa sangat berlebihan, mengingat bahwa sesungguhnya tidak ada korelasi yang signifikan antara kesalahan membaca dengan substansi teks. Kalau kesalahan

yang demikian bisa merusak seluruh argumentasi, maka para peserta bahtsul masail akan terjebak kepada aspek tekstual kitab yang berlebihan dan pada saat yang sama akan mengabaikan pesan yang terkandung dalam teks itu sendiri.

#### a. Bahtsul masail di PP Sidogiri

Bahtsul masail yang ada di PP Sidogiri dikelompokkan secara bertingkat. Mulai dari jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah, sampai Aliyah. Jenjang Ibtidaiyah terdiri dari 6 kelas, jenjang Tsanawiyah terdiri dari 3 kelas, sementara Aliyah terdiri dari 3 kelas. Dari sisi pembagian kelas diniyah, secara umum ada kesamaan antara PP. Al Falah dengan PP. Sidogiri, hanya saja di PP. Al Falah tidak ada jenjang Aliyah sementara di PP. Sidogiri ada. Namun sebagai gantinya, jenjang Aliyah sebagaimana ada di PP Sidogiri pada PP Al Falah menjadi Jam'iyah Musyawarah. Di PP. Sidogiri, para santri sejak berada di jenjang Ibtidaiyah telah diberikan pembinaan untuk melakukan bahtsul masail. Pembinaan ini berlanjut pada jenjang Tsanawiyah dengan kualitas yang lebih baik. Biasanya para santri pada jenjang Ibtida' melakukan bahtsul masail tiap jum'at pagi, sementara untuk santri jenjang Tsanawiyah dilakukan pada malam Jum'at. Pada jenjang Ibtidaiyah, pelaksanaan bahtsul masail hanya diperuntukkan bagi santri yang berada pada kelas 4 sampai 6. Sementara untuk mereka yang berada pada kelas di bawahnya belum difasilitasi untuk ikut dalam forum bahtsul masail.

Pelaksanaan bahtsul masail untuk jenjang Ibtidaiyah biasanya dilakukan santri kelas 4 sampai 6 pada tiap daerah

(komplek). Artinya mereka yang berada dalam satu kompleks diwajibkan mengikuti bahtsul masail di daerah tersebut. Pengkhususan peserta hanya kepada santri kelas 4 sampai 6 Ibtidaiyah dimaksudkan karena kelas-kelas di bawahnya belum memungkinkan diikuti pada acara bahtsul masail. Sementara itu, tidak diselenggarakannya bahtsul masail untuk seluruh santri pada jenjang Ibtidaiyah mengingat jumlah santri yang sangat banyak sehingga kalau dilakukan dalam skala besar, maka dikhawatirkan pelaksanaan bahtsul masail tidak akan efektif. Adapun pelaksanaan bahtsul masail ini adalah tiap Jum'at pagi.

Pada jenjang Tsanawiyah pelaksanaan bahtsul masail sedikit berbeda dengan jenjang Ibtida'. Pada jenjang Tsanawiyah, bahtsul masail dilakukan tidak berdasarkan daerah, akan tetapi diikuti santri pada semua daerah. Hanya saja, tidak semua santri jenjang Tsanawi bisa ikut bahtsul masail, yang diperbolehkan hanya perwakilan dari masing-masing kompleks mulai dari mereka yang duduk di kelas 1 sampai 3. Selanjutnya, santri kelas 1 dan 2 berkumpul mengikuti bahtsul masail pada hari Jum'at pagi, sementara untuk santri kelas 3 dilakukan Jum'at malam. Untuk masalah yang dikaji dalam bahtsul masail biasanya diusulkan oleh masing-masing daerah.

Pengelompokan selanjutnya adalah bahtsul masail yang diikuti oleh santri pada jenjang Aliyah. Pada jenjang ini bahtsul masail dilakukan hampir tiap malam mulai jam 9 sampai 10 dengan pengarahannya langsung para asatidz senior atau para kyai. Pada bahtsul masail ini, para santri dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 20 an santri. Sekali lagi pengelompokan ini dimaksudkan agar diskusi yang berlangsung menjadi efektif dan berdaya guna.

PP Sidogiri menyelenggarakan bahtsul masail yang diperuntukkan kepada para alumni yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan para santri dari berbagai Pondok Pesantren se Jawa Madura. Untuk bahtsul yang diikuti oleh para alumni, hal ini dimaksudkan agar komunikasi antara pihak pesantren dengan alumni tidak terputus, disamping agar para alumni mempunyai media untuk mengasah penguasaan mereka terhadap kitab kuning. Sementara itu, untuk bahtsul masail yang diikuti oleh para santri dari berbagai pesantren di Jawa Madura dimaksudkan agar silaturahmi antar masing-masing pesantren tetap terjaga dengan baik. Pelaksanaan bahtsul masail jenis ini dilaksanakan satu tahun dua kali, yakni pada bulan Rabiul Awal dan Sya'ban bertepatan dengan acara Haflah Imtihan PP Sidogiri.

Tabel 3: Kelompok Bahtsul Masail Santri di PP. Sidogiri

Jenjang	Peserta	Pendamping	Waktu
Ibtidaiyah	Kelas 4 sampai 6	Muharrir (Perumus)*	Jum'at pagi (1 x tiap minggu)
Tsanawiyah	Kelas 1 dan 2	Muharrir (Perumus)	Jum'at pagi (1 x tiap minggu)
	Kelas 3	Muharrir (Perumus)	Malam Jum'at (1 x tiap minggu)
Aliyah	Kelas 1 dan 2	Ustad Senior / Kyai	Setiap malam
	Kelas 3	Ustad Senior / Kyai	Setiap malam
Umum	Alumni	Kyai	1 Tahun 2x
Umum	Santri PP se Jawa	Kyai	1 Tahun 2x

- Muharrir dari masing-masing tingkatan personalnya berbeda. Untuk tingkat Ibtidaiyah muharrirnya dari siswa Aliyah, tingkat Tsanawiyah dari unsur Guru, tingkat Aliyah dari unsur Guru dan Kyai

#### b. Bahtsul Masail di PP Al Falah Ploso

Sebelum menjelaskan tentang kategorisasi bahtsul masail di PP. Al Falah Ploso terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang adanya peristilahan yang secara harfiah berbeda akan tetapi keduanya mempunyai titik tekan yang sama. Istilah yang dimaksud adalah kata "bahtsul masail" dan "musyawarah". Hal ini penting, mengingat di pesantren ini kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Bahtsul masail berarti forum kajian persoalan-persoalan agama yang dilakukan oleh para santri senior yang tidak lagi terikat oleh kelas kelas dirosah, atau diikuti oleh para santri yang masih terikat dengan kelas-kelas dirosah akan tetapi hal ini diikuti oleh santri pada level dirosah yang berbeda. Sementara itu

musyawarah adalah forum kajian yang dilakukan oleh para santri pada level dirosah yang sama dan pembahasannya secara bertahap didasarkan kepada acuan kitab tertentu. Apabila kitab yang menjadi acuan adalah kitab Fathul Qorib, maka musyawarahnya disebut dengan Musyawarah Fathul Qorib, demikian seterusnya untuk kitab-kitab yang lain seperti kitab Fathul Mu'in dan Fathul Wahab. Namun apabila dicermati bahwa antara bahtsul masail dan musyawarah keduanya adalah sebuah forum kajian yang memiliki pola kajian dan substansi yang sama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini peneliti tetap menganggap bahwa forum musyawarah tidak ubahnya forum bahtsul masail itu sendiri.

Bahtsul masail di Pondok Pesantren Al Falah dapat digolongkan dalam beberapa tingkat sesuai dengan tingkatan sekolah diniyah yang ada di sana. Perlu diketahui bahwa jenjang pendidikan diniyah dalam lingkup pesantren Al Falah di bagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan, Ibtida', Tsanawiy, dan Jamiyah Musyawarah. Jenjang Ibtida' terdiri dari 3 tahun, Tsanawiyah 4 tahun

dan Jamiyah Musyawarah 5 tahun. Pada jenjang Jamiyah Musyawarah inilah forum bahtsul masail secara resmi diprogramkan oleh pihak pesantren. Meskipun demikian bukan berarti pada level Ibtida'iy dan Tsanawiy forum sejenis bahtsul masail tidak diperkenalkan kepada para santri. Pada dua jenjang tersebut bahtsul masail juga diperkenalkan kepada santri hanya saja bahtsul masail pada jenjang ini masih sangat sederhana dan bersifat latihan, sehingga diharapkan santri terbiasa dengan iklim diskusi dan dialog.

Pada jenjang Jam'iyah Musyawarah, para santri dibagi dalam 3 kategori. Tahun ke 1, santri dimasukkan ke dalam kelompok Musyawarah Fathul Qorib, tahun ke 2 masuk Musyawarah Fathul Muin, dan tahun ke 3 sampai 5 masuk dalam Musyawarah Fathul Wahab. Dalam rangka mengkoordinasi masing-masing tingkatan musyawarah dan kerjasama dengan jenjang yang ada di bawah jenjang Jamiyah Musyawarah, pihak pesantren Al Falah membentuk lembaga yang disebut dengan MMU (Majelis Musyawarah Umum). Lembaga ini dibentuk untuk memaksimalkan kerja bahtsul masail dalam menyelesaikan beragam persoalan yang belum atau tidak mampu diselesaikan oleh para santri pada masing-masing jenjang yang ada. Biasanya kegiatan MMU dilaksanakan setiap satu minggu sekali.

### **C. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masail Yang Dilakukan Oleh Peserta Bahtsul Masail.**

#### **1. Cara Berfikir peserta bahtsul masail Dalam Memutuskan Hukum**

Posisi pesantren yang demikian strategis dalam hubungannya dengan masyarakat seperti digambarkan oleh Gus Dur diatas, secara tidak langsung menuntut adanya kesiapan yang tidak sederhana dari pihak pesantren untuk bisa memenuhi segala "kebutuhan" yang bersifat keagamaan dari masyarakat. Menyadari hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pesantren dalam konteks ini adalah membentuk forum yang secara khusus didesain untuk membantu memecahkan persoalan keagamaan yang dialami oleh masyarakat. Forum inilah yang selanjutnya disebut dengan bahtsul masail. Dengan demikian bahtsul masail dalam dunia pesantren merupakan forum ilmiah yang melibatkan para santri dan kyai untuk membahas persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah forum ilmiah, para peserta bahtsul masail yang terdiri dari para kyai dan santri sudah sewajarnya terikat oleh kaidah-kaidah ilmiah, dimana salah satunya adalah mendasarkan seluruh pendapatnya pada referensi-referensi ilmiah.

Terkait dengan hal ini Ustad Abdul Manan, salah satu ustad senior di Pesantren Ploso Kediri menuturkan bahwa beragam persoalan yang dibahas dalam bahtsul masail selalu didasarkan rujukannya kepada kitab-kitab salaf (kitab kuning). Pengembalian rujukan kepada kitab-kitab salaf dalam kegiatan bahtsul masail menurut Ust. Abdul Manan disebabkan karena status santri yang masih dalam taraf belajar, mereka belum mempunyai kapasitas untuk mendasarkan argumentasinya langsung kepada sumber utama hukum Islam Al

Qur'an dan Hadits. Menurutnya untuk bisa merujuk langsung kepada Al Qur'an dan hadits dalam pengambilan setiap keputusan diperlukan syarat-syarat yang tidak sederhana, diantaranya adalah kemampuan yang sangat memadai tentang Al Qur'an dan keilmuan yang terkait dengannya, memiliki pengetahuan tentang hadits dan yang terkait dengannya, serta memiliki kemampuan dalam kebaharaban. Wal hasil dengan persyaratan itu, yang layak untuk mengembalikan dalil kepada Al Qur'an dan Hadits secara langsung hanya para ulama' mujtahid, seperti Imam Hanafi, Syafi'i, dan imam madzhab yang lain. Selain mereka rasanya tidak pada tempatnya memosisikan diri seperti para ulama mujtahid, apalagi hanya sekedar santri pondok pesantren. Selanjutnya dikatakan bahwa pendapat-pendapat para ulama seperti yang tertuang di dalam kitab-kitab kuning sampai saat ini masih layak dijadikan rujukan. Kalaupun redaksi yang tertulis di sana tidak secara langsung bersinggungan dengan persoalan kontemporer yang dibahas, karena ada perbedaan bentuk atau tipologi, sebenarnya secara substansi hal itu diyakini masih bisa dianalogkan oleh para santri. Sebagai contoh apabila pembahasannya seputar presiden, maka yang dijadikan sebagai bahan analog adalah konsep imamah atau khilafah.

Pendapat Ust. Abdul Manan Ust. Sesuai dengan Uts. Mashuri dari PP. Sidogiri menyatakan bahwa keberadaan kitab kuning sebagai rujukan utama dalam bahtsul masail sampai saat ini masih memadai. Belum pernah ditemukan suatu persoalan yang dibahas dalam bahtsul masail yang tidak ada

rujukannya dalam kitab kuning. Pandangan yang berbeda disampaikan oleh beberapa santri senior, mereka beranggapan bahwa keberadaan kitab kuning tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dalil. Dalam persoalan-persoalan yang berhuungan dengan ibadah ritual, keberadaan kitab kuning masih sangat memadai, namun untuk persoalan kedokteran dan mu'amalah sangat sulit mencari dasar argumentasi yang tepat. Kalau saja ketemu, maksimal yang dilakukan adalah menganalogkan suatu ta'bir kepada persoalan yang dikaji. Sebab redaksi yang lugas dan kongkrit yang terkait langsung dengan tema kajian barangkali sulit ditemukan. Hal ini karena perkembangan untuk persoalan kedokteran dan mu'amalah sangat cepat dan hal-hal yang terjadi pada saat ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada saat para ulama klasik dahulu merumuskan kitab. Dapat tertangkap ada keengganan dari para peserta bahtsul masail untuk menggunakan dasar argumentasi kepada selain *ta'bir-ta'bir* kitab kuning, termasuk di dalamnya keengganan menggunakan teori yang diambil dari ilmu-ilmu sosial, kaidah fiqih, dan bahkan ayat-ayat Al Qur'an dan hadits Nabi sekalipun. Dalam kasus ketika peserta bahtsul masail tidak menggunakan teori dari ilmu-ilmu sosial, pihak pesantren beranggapan bahwa teori-teori yang diambil dari luar pesantren tidak sepenuhnya bisa diterima oleh para santri, demikian sebagaimana disampaikan oleh Ust. Masyhuri;

Penekanan terhadap penggunaan literatur-literatur klasik secara tidak langsung akan menimbulkan persoalan baru. Relevansi dan efektivitas materi

yang ada dalam literatur klasik akan menjadi hambatan tersendiri manakala harus berhadapan dengan realitas sosial dalam konteks kekinian. Hal ini perlu disadari mengingat *setting* sejarah telah berubah. Ada perbedaan yang mendasar antara kondisi ketika suatu kitab kuning disusun dengan konstelasi saat ini. Konstruksi budaya dan latar belakang sosial yang dijalani para *mushannif* (pengarang kitab) pada saat mengarang kitab sangat berpengaruh terhadap suatu hasil pemikiran. Dengan bahasa lain bahwa suatu hasil pemikiran tidak pernah muncul dan berkembang dari kevakuman. Ia selalu merupakan hasil interaksi berbagai faktor, dan faktor ruang dan waktu acapkali dominan. Bahkan menurut Hanafi (dalam Assaukani, 1998:xiv) tema-tema yang diangkat di berbagai literatur klasik yang kemudian menjadi doktrin prinsip umat Islam, pada hakekatnya adalah juga bagian dari proyek konstruksi sejarah itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa fiqh sebagaimana tertuang dalam kitab kuning adalah produk ijtihad yang sangat terkait dengan kondisi sosio kultural dimana dan kapan dirumuskan. Dalam kaitannya dengan hal ini Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan: “perubahan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan, dan adat-istiadat” (Mahmassani, 1981:219). Sehingga, adalah sangat wajar jika problem-problem dalam konteks sosial dewasa ini tidak masuk dalam daftar kajian kitab-kitab klasik.

Demikian juga dalam memutuskan persoalan hukum, sedapat mungkin pesantren tidak terjebak pada

paradigma tektualis yang menitikberatkan pada formalitas *nash-nash* (teks-teks) kitab kuning. Kajian melalui pendekatan historis dan sosiologis kiranya patut untuk dilakukan. Sebab, pendekatan ini tidak hanya melihat *nash-nash* dalam bentuknya yang verbal, akan tetapi mencoba menghubungkannya dengan *asbab an-nuzul* (sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Qur’an) dan *asbab al-wurud* (sebab-sebab lahirnya Hadits) serta relevansinya dengan konteks saat ini.

Pesantren harus menyadari bahwa kompleksitas problem yang dihadapi umat dewasa ini rasanya sudah tidak mungkin lagi bisa dikaji hanya melalui perspektif agama, namun harus melibatkan berbagai disiplin ilmu di luar agama. Untuk itu, pesantren kiranya harus siap dan mau membuka diri dalam mengintrodusir berbagai disiplin ilmu yang selama ini mereka anggap “sekuler”. Ilmu-ilmu seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, hukum dan ilmu-ilmu modern lainnya barangkali bisa diakomodasi dalam bingkai kurikulum. Sehingga dari sini diharapkan wawasan serta cakrawala berfikir santri akan senantiasa berkembang dalam meneropong setiap keadaan, dan pada gilirannya mampu membahasakan norma-norma agama dalam segala aspek kehidupan. Dalam kasus ketika peserta bahtsul masail tidak menggunakan kaidah fiqh di dalam bahtsul masail, KH Masruhin Baidhawi selaku pembina bahtsul masail menuturkan bahwa penggunaan kaidah fiqh dalam bahtsul masail justru akan berbelit-belit. Kaidah fiqh itu kan kaidah yang ada di dalam fiqh, itu banyak kejadian-kejadian fiktif.

Penggunaan *ta'bir* sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, secara faktual memang sangat dominan dalam pelaksanaan bahtsul masail. Namun demikian bukan berarti para peserta bahtsul masail tidak menggunakan dasar-dasar yang lain. Dalam kondisi "terpaksa" ketika keberadaan *ta'bir* menurut para peserta tidak lagi ditemukan, maka mereka mencoba mengambil dasar dari ayat Al Qur'an dan Hadits. Mencermati gambaran pola berfikir para peserta bahtsul masail diatas, baik dari kalangan kyai maupun santri terlihat bahwa pola pengambilan hukum yang mereka lakukan dalam bahtsul masail sangat bertolak belakang dengan mekanisme yang dilakukan oleh kalangan umat Islam modernis, dimana mereka lebih senang apabila merujuk langsung kepada ayat Al Qur'an dan hadits bila dibanding dengan fatwa-fatwa ulama dalam kitab kuning. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa Al Qur'an dan hadits adalah sumber hukum Islam yang sangat otentik yang harus menjadi pijakan bagi seluruh umat Islam.

Keterikatan peserta bahtsul masail di pesantren dengan rumusan-rumusan kitab kuning dalam pengambilan keputusan apabila difahami secara seksama dapat dikatakan bahwa hal itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Terjadi proses panjang yang melatarbelakanginya, satu diantaranya adalah pola transfer pengetahuan yang diterapkan oleh pihak pesantren kepada para santri memang tidak memberikan peluang para santri untuk berinteraksi secara langsung dengan Al Qur'an dan hadits. Pesantren selama ini memberikan pengajaran khususnya bidang fiqih

kepada santri melalui kitab-kitab fiqih yang relatif mapan. Sementara itu, kitab-kitab tersebut pola penulisannya hampir tidak pernah dijumpai mendasarkan pendapatnya dengan merujuk dan menukil ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi.

Pola yang dipakai oleh peserta bahtsul masail mencerminkan pola berfikir satu arah, dimana varian pendukung seperti teori-teori sosiologi, komunikasi, ekonomi dll. yang mestinya bisa menjadi sumber penguat dalam memutuskan suatu persoalan belum termanfaatkan dengan baik, bahkan ada kesan teori-teori tersebut sengaja dihindari. Apabila dicermati dengan seksama tidak dilibatkannya beragam pengetahuan umum yang tidak diajarkan di pesantren dalam bahtsul masail, bisa diidentifikasi setidaknya ada dua alasan. *Pertama*, teori-teori dari luar pesantren masih belum banyak digeluti oleh kalangan santri, sehingga terasa asing bagi kalangan santri; Dan *kedua*, ada anggapan bahwa teori-teori tersebut dirasa tidak ada hubungannya dengan keilmuan di pesantren, sehingga tidak perlu dipaksa masuk. Dalam konteks ini, pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah sampai kapan pesantren akan bertahan dengan pola seperti ini. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kompleksitas problem manusia semakin hari semakin meningkat. Persoalan yang secara lahiriyah terkesan persoalan agama, sejatinya hal itu tidak bisa dilepaskan dengan persoalan di luar keagamaan. Sebut saja satu contoh penggunaan vaksin dalam ibadah haji, persoalan ini jelas tidak bisa dikaji hanya melalui kitab-kitab kuning, akan tetapi

memerlukan kajian lain dari sudut pandang kesehatan, kebijakan publik, politik dll.

## 2. Penggunaan Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Memutuskan Hukum Oleh Para Peserta Bahtsul Masail.

Secara sosiologis dapat dilihat bahwa problematika kehidupan manusia semakin hari menunjukkan trend kompleksitas yang semakin meningkat. Hal ini dapat difahami mengingat bahwa interaksi yang dilakukan oleh manusia juga terjadi tidak hanya dalam satu bidang kehidupan, akan tetapi merambah semua sisi kehidupan manusia itu sendiri. Para Kyai dan Santri di Pondok Pesantren disadari atau tidak juga harus berhadapan dengan realitas yang sedemikian kompleks. Karena itu, suatu persoalan yang tampak dari "sisi luar" terkesan sangat dekat dengan persoalan agama misalnya, hal itu tidak menutup kemungkinan akan besinggungan dengan persoalan-persoalan di luar agama, sebut saja persoalan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Dengan demikian, para kyai dan santri peserta bahtsul masail pada hakekatnya tidak bisa melepaskan diri dari kompleksitas problematika yang ada. Sehingga, persoalan-persoalan yang selama ini dianggap masuk dalam wilayah agama, bisa jadi terikat kuat dengan hal-hal diluar agama. Menurut Ust. Masyhuri bagi kalangan pesantren penggunaan ilmu-ilmu di luar yang diajarkan di pesantren dalam bahtsul masail selama ini masih belum nampak. Alasannya sederhana, bahwa para santri belum familier dengan ilmu-ilmu tersebut, sehingga mereka (para peserta bahtsul) masail merasa tidak perlu menggunakan

ilmu-ilmu tersebut sebagai argumentasi pendukung.

Alasan lain yang menyebabkan tidak digunakannya beragam teori dari luar khazanah ilmu-ilmu kepesantrenan adalah karena adanya sikap *khusnudhon* (positif thinking) para peserta bahtsul masail terhadap pemikiran para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab klasik bahwa apa yang telah dituangkan dalam kitab-kitab tentunya telah memperhatikan beragam pertimbangan. Kalaupun ada perbedaan antara pemikiran ulama' *salaf* (klasik) dengan ulama' *khalaf* (modern), maka para peserta bahtsul masail lebih memilih kepada pemikiran ulama klasik. Namun argumentasi diatas, bisa jadi hanya sebagai pelarian dari tidak adanya kesiapan para peserta bahtsul masail dalam menggunakan ilmu-ilmu di luar pesantren sebagai pijakan berfikir untuk memutuskan suatu persoalan. Sebenarnya mengacu kepada teori yang disampaikan Gus Dur dalam paparan sebelumnya, diketahui bahwa ada posisi yang sangat ideal bagi pesantren dalam konteks tranformasi ilmu pengetahuan dan moralitas kepada masyarakat. Pesantren mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk mewujudkan hal itu.

## 3. Keterlibatan Pihak Luar Pesantren Dalam Membantu Memutuskan Hukum

Kalau penggunaan ilmu-ilmu di luar yang pesantren bisa dikatakan sangat minim, maka lain halnya dengan pelibatan pihak-pihak di luar pesantren dalam kegiatan bahtsul masail. Pelibatan pihak-pihak dari luar pesantren adakalanya secara langsung adakalanya tidak. Pelibatan tidak langsung, misalnya

penggunaan internet sebagai sumber informasi seputar tema yang dikaji. Sementara pelibatan langsung misalnya mendatangkan pihak-pihak yang berkompenten, seperti dari instansi pemerintah atau swasta untuk memberikan penjelasan seputar tema yang dikaji.

Pelibatan pihak-pihak di luar pesantren dalam bahtsul masail menjadi hal yang sangat positif dalam konteks pendalaman materi kajian. Sebab tidak diragukan lagi bahwa pengetahuan para peserta bahtsul masail terhadap persoalan-persoalan kontemporer secara umum masih minim. Dalam kondisi yang demikian, ketika mereka dipaksakan untuk mengkaji dan selanjutnya memberikan fatwa hukum, maka dikhawatirkan akan menjauhkan masyarakat dengan pesantren. Sebab masyarakat umum tidak akan melihat siapa dibalik keluarnya sebuah fatwa, akan tetapi yang dilihat adalah bagaimana pesantrennya. Senada dengan pendapat diatas, Ust. Masyhuri menuturkan bahwa pesantren Sidogiri tidak segan-segan mendatangkan pihak luar untuk membantu memberikan penjelasan seputar tema yang dibahas sekaligus untuk mendudukkan persoalan tersebut.

Berdasarkan pengamatan penelitian, di Pesantren Sidogiri keterlibatan nara sumber memang sangat membantu peserta bahtsul masail di dalam mengkaji suatu persoalan. Sebagai contoh dalam bahtsul masail yang membahas persoalan BMT dan jaringan MLM Tiansi, yang mempertanyakan apakah keuntungan dana yang di dapat dari BMT dapat digunakan untuk kepentingan sosial? Demikian dalam kasus MLM Tiansi

apakah praktek penjualan seperti ini bibenarkan oleh Islam atau tidak, mengingat ada kesan ketidakadilan dalam pengelolaan, mereka yang berada pada level tinggi dalam jaringan ini (biasanya disebut dengan "bintang") tanpa harus bekerja mereka mendapatkan pendapatan yang sangat banyak. Dalam bahtsul masail kali ini pihak panitia mendatangkan Manager BMT Pesantren Sidogiri H.M. Dumairi Nur dan H.M. Masykuri selaku pihak yang menduduki top level dalam jaringan Tiansi. Nara sumber yang dilibatkan dalam bahtsul masail memang tidak selalu dari para praktisi, akan tetapi juga dari kalangan agamawan yang diasumsikan memiliki kapasitas dan pengalaman untuk membahas masalah yang dikaji, sebut saja dari kalangan NU. Dalam pelaksanaan di lapangan, memang tidak semua bahtsul masail di pesantren Ploso dan Sidogiri selalu mendatangkan nara sumber untuk menjelaskan suatu persoalan. Menurut pengakuan para santri di pesantren Ploso, selama mereka mengikut bahtsul masail dalam berbagai level, mereka belum pernah melihat ada nara sumber yang didatangkan. Bahkan untuk bahtsul masail antar santri pondok pesantren se Jatim yang diselenggarakan oleh PWNU baru-baru ini juga tidak dihadirkan nara sumber.

Langkah lain untuk menggantikan posisi nara sumber adalah dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui internet. Internet diyakini oleh pihak pesantren sebagai sumber informasi yang memadai untuk semua persoalan. Karena itu, jika mereka merasa belum memahami suatu persoalan beserta seluk beluknya, cara yang mereka

tempuh adalah dengan mengakses informasi dari internet. Informasi cukup dari internet. Nanti di copy terus disimpulkan oleh temen-temen (peserta bahtsul masail) menggunakan rumusnya itu, oh.. persoalannya seperti ini, seperti ini dan seterusnya. Langkah peserta bahtsul masail mencari informasi dari internet, setidaknya bisa membantu mereka mengetahui seluk beluk persoalan yang dikaji. Namun harus disadari bahwa penggunaan informasi dari internet sebagai pengganti nara sumber bagaimanapun juga tidak bisa menggantikan posisi nara sumber secara penuh. Sebab, informasi dari internet hanya bersifat pasif yang tidak bisa menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul seputar persoalan yang dibahas. Hal ini sangat berbeda jika nara sumber hadir di tengah-tengah bahtsul masail. Nara sumber bisa menjelaskan banyak hal seandainya ada hal-hal yang belum bisa difahami oleh peserta atau memberikan sanggahan apabila ada pemahaman peserta yang salah terhadap masalah yang dikaji.

Kehadiran nara sumber dengan demikian lebih membantu proses bahtsul masail bila dibanding dengan informasi dari internet. Namun demikian, semua itu juga bergantung kepada kapabilitas dan integritas nara sumber. Apabila nara sumber yang didatangkan tidak mempunyai kapabilitas atau yang bersangkutan mempunyai *vested interes* untuk kepentingan individu dan kelompoknya, maka hasil yang didapatkan pasti kurang maksimal. Keterlibatan pihak luar dalam proses bahtsul masail baik yang langsung maupun yang tidak langsung tidak

dipungkiri memiliki arti yang sangat penting. Sebab, seperti banyak diketahui bahwa pengetahuan dan penguasaan peserta bahtsul masail terhadap persoalan-persoalan kontemporer secara umum masih minim. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang dikembangkan di pesantren lebih terorientasi kepada pendidikan agama, sehingga kesempatan untuk mengkaji hal-hal di luar ilmu agama sangat kurang. Dengan keterlibatan pihak-pihak luar pesantren dalam bahtsul masail, maka keputusan hukum yang ditelorkan melalui bahtsul masail itu sendiri setidaknya dapat mengurangi resiko kesalahan yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan peserta terhadap materi yang dibahas, sekaligus yang demikian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada pihak-pihak di luar pesantren.

#### **D. Latar Belakang Para Peserta Bahtsul Masail Mengangkat Persoalan-Persoalan Politik dalam Forum Bahtsul Masail.**

1. Apa aspek-aspek politik yang menjadi fokus pembicaraan dalam forum bahtsul masail

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bahtsul masail adalah forum yang membahas tentang beragam problematika kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tak terkecuali persoalan yang berkaitan dengan politik. Dalam mahtsul masail yang dilangsungkan di pesantren Al Falah Ploso dan Sidogiri persoalan politik bukanlah menjadi persoalan yang asing. Banyak kasus yang terkait dengan politik dikaji melalui bahtsul masail. Diantaranya adalah persoalan boleh

tidaknya wanita menjadi seorang presiden, apakah Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara Islam atau tidak, hukum menerima “amplop” dari calon anggota legislatif, dll.

Secara umum aspek politik yang dibahas dalam bahtsul masail dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yakni hal-hal yang bersifat normatif dan pragmatis. Normatif yang dimaksud di sini adalah persoalan politik yang dibahas dalam bahtsul masail bersifat teoritis, dimana benar dan tidaknya hal tersebut di dasarkan pada teori-teori yang dikembangkan oleh para ulama' dalam referensi-referensi klasik. Sementara pragmatis adalah persoalan politik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Melalui bahtsul masail persoalan-persoalan politik di hadapi masyarakat dapat disikapi dengan bijaksana oleh masyarakat khususnya umat Islam dengan berdasar pada hukum Islam.

Dalam kasus pertama untuk persoalan politik yang bersifat normatif, keberadaan bahtsul masail boleh dikata tidak berpotensi terseret kepada arus politik yang ada, sebab yang dibicarakan dalam konteks ini adalah hal-hal yang bersifat normatif. Sebagai contoh, persoalan status negara Indonesia apakah dapat dikategorikan sebagai negara Islam. Menurut hasil bahtsul masail yang dilakukan oleh pesantren Ploso dinyatakan bahwa secara substansi negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara Islam berdasarkan ciri-ciri yang ada. Dalam referensi klasik, suatu negara dinyatakan negara Islam apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; (1). Pernah diperintah oleh kerajaan Islam,

(2) Mayoritas penduduknya adalah muslim dan (3) Pemimpinnya adalah beragama Islam. Apabila merujuk pada tiga kriteria di atas, maka negara Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara Islam. Sebab, disamping mayoritas penduduknya bergama Islam dan pemimpinnya selalu beragama Islam, Indonesia juga pernah dipimpin oleh kerajaan Islam, seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak dll. Keputusan bahtsul masail ini, jika dikomparasikan dengan rumusan legal formal dasar negara Indonesia jelas sangat bertolak belakang bahwa Indonesia adalah negara yang tidak berdasar Pancasila dan bukan kepada agama Islam.

Berbeda dengan persoalan politik yang bersifat normatif, persoalan politik yang bersifat pragmatik mempunyai tingkat kerawanan tinggi dalam hal kepentingan. Artinya bahwa kajian tentang politik ini sangat berpotensi menyeret pihak pesantren kepada arus politik tertentu, sehingga hasil kajian dalam bahtsul masail menjadi tidak orisinal. Sebagai contoh dalam hal pemilihan presiden 2009, bahtsul masail merekomendasikan untuk memilih calon yang mempunyai kedekatan dengan NU. Hasil ini bisa ditebak diarahkan kepada pasangan JK Wiranto, sebab hanya JK lah yang sangat dekat dengan NU bahkan dia menjadi salah satu pengurus di Sulawesi Selatan.

## 2. Latar Belakang Penyebab Peserta Bahtsul Masail Memilih Aspek-Aspek Politik Dikaji dalam Bahtsul Masail.

Setiap sepak terjang seseorang dalam suatu hal pasti berkait erat dengan

latar belakang dan motivasi mengapa yang bersangkutan melakukan hal itu. Demikian juga para kyai dan santri melakukan kajian terhadap persoalan politik, sudah pasti berkaitan dengan hal-hal khusus yang melatarbelakanginya. Secara umum bahtsul masail dilaksanakan untuk merespon persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Persoalan politik adalah salah satu dari sekian persoalan masyarakat yang tidak luput dari perhatian kalangan pesantren. Salah satu bentuk apresiasi pihak pesantren dalam persoalan ini adalah memasukkan beberapa tema politik ke dalam agenda bahtsul masail. Langkah mereka mengagendakan tema politik dalam bahtsul masail sudah barang tentu mempunyai latar belakang tersendiri.

Salah satu hal penting yang menjadi alasan mengapa membahas masalah politik, karena pihak pesantren merasa bahwa persoalan politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Karena bagian dari persoalan kemasyarakatan, pihak pesantren merasa terpenggil untuk melihat persoalan politik itu dari kacamata agama. Sebab muncul anggapan di sebagian umat Islam bahwa persoalan politik hendaknya dipisahkan dari unsur agama. Anggapan ini bagi kalangan pesantren sangat berbahaya, sebab politik yang tidak dijiwai oleh nilai-nilai agama hanya akan menjadikan politik sarana perebutan kekuasaan yang tidak berorientasi kepada keselamatan dunia akherat. Oleh karena itu, melalui kajian dalam bahtsul masail pihak pesantren berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dari aspek hukum

islam kepada masyarakat mana saja perilaku politik yang dibenarkan oleh Islam dan mana yang tidak.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah pelestarian khazanah Islam. Sebagaimana diketahui bahwa para pemikir Islam klasik tidak hanya menyibukkan diri mereka ke dalam kajian-kajian yang bersifat ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji akan tetapi banyak diantara mereka yang mendalami kajian di luar hal-hal tersebut. Satu diantaranya adalah persoalan politik. Beberapa karya ulama klasik setidaknya bisa membuktikan hal itu. sebagai contoh Imam Ibnu Taymiyyah mengarang kitab *As Siyasah As Syar'iyah*, Imam Mawardi mengarang kitab *Ahkamus Sulthaniyah*. Melihat sepaik terjang para ulama klasik yang demikian pihak pesantren berharap bisa meneruskan tradisi intelektual mereka, setidaknya mengkaji persoalan politik dari perspektif agama.

### 3. Latar Belakang Penyebab Peserta Bahtsul Masail Memilih Aspek-Aspek Politik Dikaji Dalam Bahtsul Masail.

Setiap sepaik terjang seseorang dalam suatu hal pasti berkait erat dengan latar belakang dan motivasi mengapa yang bersangkutan melakukan hal itu. Demikian juga para kyai dan santri melakukan kajian terhadap persoalan politik, sudah pasti berkaitan dengan hal-hal khusus yang melatarbelakanginya.

Secara umum bahtsul masail dilaksanakan untuk merespon persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Persoalan politik adalah salah satu dari sekian persoalan

masyarakat yang tidak luput dari perhatian kalangan pesantren. Salah satu bentuk apresiasi pihak pesantren dalam persoalan ini adalah memasukkan beberapa tema politik ke dalam agenda bahtsul masail. Langkah mereka mengagendakan tema politik dalam bahtsul masail sudah barang tentu mempunyai latar belakang tersendiri.

Salah satu hal penting yang menjadi alasan mengapa membahas masalah politik, karena pihak pesantren merasa bahwa persoalan politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Karena bagian dari persoalan kemasyarakatan, pihak pesantren merasa terpanggil untuk melihat persoalan politik itu dari kacamata agama. Sebab muncul anggapan di sebagian umat Islam bahwa persoalan politik hendaknya dipisahkan dari unsur agama. Anggapan ini bagi kalangan pesantren sangat berbahaya, sebab politik yang tidak dijiwai oleh nilai-nilai agama hanya akan menjadikan politik sarana perebutan kekuasaan yang tidak berorientasi kepada keselamatan dunia akhirat. Oleh karena itu, melalui kajian dalam bahtsul masail pihak pesantren berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dari aspek hukum islam kepada masyarakat mana saja perilaku politik yang dibenarkan oleh Islam dan mana yang tidak.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah pelestarian khazanah Islam. Sebagaimana diketahui bahwa para pemikir Islam klasik tidak hanya menyibukkan diri mereka ke dalam kajian-kajian yang bersifat ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji akan tetapi banyak diantara mereka yang

mendalami kajian di luar hal-hal tersebut. Satu diantaranya adalah persoalan politik. Beberapa karya ulama klasik setidaknya bisa membuktikan hal itu. sebagai contoh Imam Ibnu Taymiyyah mengarang kitab *As Siyasa As Syar'iyah*, Imam Mawardi mengarang kitab *Ahkamus Sulthaniyah*. Melihat sepak terjang para ulama klasik yang demikian pihak pesantren berharap bisa meneruskan tradisi intelektual mereka, setidaknya mengkaji persoalan politik dari perspektif agama.

Satu hal yang terungkap bahwa diangkatnya masalah politik dalam bahtsul masail merupakan bentuk tanggung jawab pesantren terhadap masyarakat dalam menghadapi fenomena politik yang berkembang. Fenomena politik yang melahirkan pro dan kontra dalam masyarakat karena belum dasar ketetapan fikih yang pasti tentang fenomena tersebut. Dalam konteks inilah pesantren terpanggil untuk memberikan "bantuan" kepada masyarakat dengan mengkaji melalui bahtsul masail. Harapannya adalah bahwa ada dasar-dasar fikih yang jelas dengan rasional jelas yang dapat dijadikan pegangan dalam mensikapi fenomena politik yang sedang berkembang. Landasan berpikir yang digunakan adalah dengan menempatkan kemaslahatan umat sebagai tolok ukur utama dalam mengkaji fenomena politik yang sedang berkembang. Jika fenomena politik lebih banyak mendatangkan kemaslahatan umat maka fenomena politik tersebut akan diposisikan sebagai hal positif (boleh), tetapi sebaliknya jika fenomena politik lebih banyak mendatangkan kemudhorotan bagi umat maka akan

diposisikan sebagai negatif (tidak boleh/dilarang).

#### 4. Apa Dasar-Dasar Pemikiran (Referensi) Utama yang Dipakai Peserta Bahtsul Masail dalam Mengambil Kesimpulan dalam Forum Bahtsul Masail

Pembahasan dan kajian yang muncul dalam bahtsul masail selalu didasarkan pada kitab kitab klasik pesantren yakni kitab kuning yang sesuai dengan topic bahasan. Pembahasan dalam bahtsul masail rutin dengan kelompok dibagi atas kitab fathulqorib, fathul muin, dan fathul wahab mencoba menemukan alasan yang lebih jelas pada isi kitab-kitab tersebut dalam kajian terbuka secara langsung. Referenin dsi klasik yang lebih dikenal dengan kitab kuning diyakini mampu memberikan rujukan yang memadai untuk dijadikan panduan dalam menjelaskan berbagai persoalan (wawancara dengan Bapak Abdul Manan di Ploso).

Satu aspek yang menarik adalah bahwa kalangan pesantren tetap meyakini bahwa kitab-kitab kuning yang dijadikan rujukan tidak kehilangan relevansinya walaupun ditulis pada beberapa abad yang silam. Tetapi untuk bisa menggunakan kitab kuning dengan baik seseorang harus memiliki beberapa kemampuan, antara lain bahasa arab dan ilmu lain yang terkait. Forum bahtsul masail di pondok pesantren merupakan wahana belajar para santri bagaimana seharusnya mengkaji suatu masalah dengan menggunakan kitab kuning.

Beberapa kitab kuning yang lazim digunakan di pesantren antara lain; Fathul qorib, Fathul Muin, Fathul

Wahab, Kifayatul Akhyar, Bajuri, Iqna, Mahalli, Sulam At Taufiq, Tahrir, Uqud Al-lujain, Sabil Al-Muhtadin, Jawahirul Kalamiyah, Aqidatul Islamiyah, Jalalain, Tafsir ibn Katsir, Tafsirul Manar, Shahih bukhori, dan masih banyak lagi. Kitab-kitb ini dapat dikelompokan sesuai dengan isinya yakni Kitab Fiqih dan ushul fiqih, Aqidah (ushuluddin dan tauhid), Tafsir Al Quran, Hadits dan ilmu hadits, akhlak dan Tasawuf, Kitab sejarah, dan kitab yang menyangkut ritual dan alam ghoib. Pesantren Ploso dan Sidogiri memiliki sederet kitab yang tergolong kitab-kitab tersebut.

#### Kesimpulan dan Saran

Berdasar hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masalah yang dikaji dalam bahtsul masail adalah masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, baik masalah politik, ekonomi, social, budaya, dan terutama masalah yang terkait dengan keagamaan. Masalah-masalah yang dibahas adalah masalah yang secara tegas dan eksplisit belum ditemukan rujukan dasarnya dalam fikih yang sudah ada. Hasil Bahtsul masail sangat beragam dan dinamis, artinya banyak masalah yang berhasil diberikan dasar fikihnya beserta alasan dan kitab rujukannya. Dinamis artinya bahwa putusan bahtsul masail dapat mengalami perubahan, misalnya dari Haram ke halal atau sebaliknya. Proses pengkajian dan pengambilan putusan dalam bahtsul masail sangat terbuka dan demokratis. Proses diskusi tidak jauh perbedaan dengan diskusi yang dilaksanakan dalam forum-forum ilmiah di luar komunitas pesantren. Satu hal yang menonjol adalah

bahwa hasil tim perumus yang telah disahkan akan dijadikan pegangan bagi komunitas pesantren dan bersifat mengikat. Keputusan menjadi final ketika pemimpin bahtsul masail membacakan surah Al Fatimah sebagai tanda keputusan dalam forum bahtsul masail telah memiliki legitimasi..

Dasar utama pemikiran para kyai dan santri adalah mengacu pada ada tidaknya kemaslahatan bagi umat tanpa harus meninggalkan norma ubudiyah yang sudah baku. Di sisi lain masyarakat juga perlu dibantu untuk mendapatkan suatu pegangan fikih dalam mensikapi berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kyai dan santri dengan institusi pondok pesantren memiliki kewajiban moral untuk selalu menjaga situasi dan kondisi masyarakat agar dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik dan tidak melanggar norma-norma agama yang dianut. Pembahasan aspek politik dalam forum bahtsul masail tidak lepas dari hal tersebut. Ketika dalam bidang politik timbul fenomena baru dan kemudian menimbulkan masalah dalam masyarakat (pro dan kontra) maka forum bahtsul masail mencari solusi dengan harapan dapat dijadikan panduan bagi masyarakat dalam menyikapi fenomena politik tersebut.

Hasil penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut, untuk itu direkomendasikan untuk melakukan penajaman fokus penelitian, terutama pada uji materi kebenaran yang dijadikan kriteria dalam pengambilan keputusan bahtsul masail. Hal ini penting dilakukan karena selama ini hasil bahtsul masail seolah hanya berlaku dan mengikat pada

komunitas pesantren dan masyarakat di sekitarnya. Jika kriteria kebenaran yang berlaku dalam bahtsul masail bisa diterima masyarakat luas, mestinya hasil bahtsul masail dapat lebih luas pengaruhnya dalam masyarakat.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana proses diseminasi hasil bahtsul masail keluar pesantren dan menyebar di kalangan masyarakat. Masyarakat yang merupakan daerah kantong pengaruh pesantren biasanya mudah menerima hasil bahtsul masail, tetapi tidak demikian halnya masyarakat luas yang jauh dari pengaruh pesantren mereka lebih longgar dalam mensikapi hasil bahtsul masail. Contoh kasus adalah ketika sebuah pesantren menyampaikan tidak bolehnya pemimpin wanita (dalam pilgub Jatim), maka yang menyambut seruan tersebut hanya daerah-daerah yang pengaruh pesantren itu cukup kuat.

## Daftar Pustaka

Al Qur'an dan Terjemahnya.

Ali, M. D. 1998. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Rajawala Pres.

Bogdan, R. C. dan Biklen, S. K. 1998. *Qualitative Research In Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.

Djamil, F. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.

Khalaf, A. W. 1978. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Beirut.: Dar al Qalam.

- Lincon, Y. S. dan Guba, E. G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publication.
- Mahfudz, MA. Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sources Book of New Methods*. Beverly Hill, CA: SAGE Publications.
- Muzadi, A H.. 1999. *Membangun NU Pasca Gus Dur*. Jakarta: Gramedia
- Munawir, A. W. 1995. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasih, A. M. 2002. *Kajian Fiqh Sosial dalam Bahtsul Masail. Studi Kasus Pondok Pesantren Lirboyo Kediri*. Universitas Islam Malang. Tesis Tidak Diterbitkan
- 2005. *Kaum Santri Menjawab Problematika Sosial*. Malang.: UM Press.
- Oepen, M dan Karcher, W. (Ed.). 1988. *Dinamika Pesantren Dampak Pesantren dalam Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: P3M
- Rosyada, D. 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*. Jakarta.: Rajawali Pres.
- Syaukani. 1992. *Irsyad al Fuhul Ila Tahqiq al Haq Min Ilmi al Ushul*. Kairo: Dar al Kutub.
- Syahrastani. T.Th. *Al Milal wa al Nihal*. Beirut: Dar al Fikr.
- Zahro, A. 2004. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKIS.
- Zahroh, M A.. 1958. *Ushul al Fiqh*. Beirut: Dar al Fikr al Arabi.
- Zuhaili, W. 1988. *Ushul al Fiqh*. Beirut: Dar al Fikr.